

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja usaha merupakan tolak ukur seberapa besar perusahaan mengimplementasikan tujuan, sasaran, visi, dan misi yang dibuat dalam menggerakkan rencana strategis usaha melalui aktivitas produksi dan pemasaran secara totalitas, sehingga dihasilkan suatu prestasi bisnis (Herawan & Wijaya, 2020; Fadilah et al., 2022). Dalam menjalankan usaha, sebuah kinerja dianggap sebagai pencapaian terukur yang dapat menguntungkan pemangku usaha atau bisnis apabila memiliki data seperti, jumlah penjualan dan biaya operasional yang digunakan (Agus et al., 2023). Keberhasilan dalam kinerja usaha dinilai sebagai suatu aspek penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Bidasari et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui Produk Nasional Bruto (PNB) yang memproyeksikan total pendapatan negara dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang memproyeksikan kinerja ekonomi dan jumlah pendapatan domestik (Fadhilah, 2024).

Keberhasilan kinerja usaha ditunjukkan melalui data perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 2022. Data tersebut menampilkan keberhasilan kinerja usaha yang diukur melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) wilayah Jawa Timur. PDRB termasuk komponen dari PDB yang dapat menjadi tolak ukur peningkatan ekonomi nasional. Tabel 1.1 menjelaskan terkait sajian data realisasi kinerja dan capaian kinerja KUMKM tahun 2019 hingga 2024 dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Tabel 1. 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target						Realisasi			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022
Tujuan												
Nilai Tambah KUMKM	Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur	Persen	5,501	-3,5	0,75 – 1,25	1,25 – 1,75	2,25 – 2,75	3,15 – 3,65	5,78	-3,31	8,84	7,19
Sasaran												
Nilai Tambah Bruto KUMKM	Perkembangan Nilai Tambah Bruto KUMKM	Rp T	8,6	3,43	3,5	3,75	3,8	4	6,3	6,08	4,39	6,31
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	Persen	80,2	80,4	82,31	82,51	82,71	83	81,92	82,11	84,75	84,97

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Pada tabel di atas menjelaskan adanya peningkatan nilai tambah bruto KUMKM yang merupakan indikator kinerja daerah urusan KUMKM dengan indikator persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KUMKM Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei perhitungan Nilai Tambah KUMKM yang dilakukan setiap tahun, pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai -3,31 persen yang merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19, sehingga perekonomian mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2021, sehingga pertumbuhan PDRB KUMKM mencapai 8,84 persen. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan 1,65 persen dari tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada saat penyusunan renstra perubahan tahun 2019 – 2024, pertumbuhan yang dicapai telah melampaui target.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dibentuk oleh perorangan maupun badan di berbagai sektor perekonomian bersifat mandiri produktif (Telaumbanua, 2021; Azzahra & Wibawa, 2021). Menurut data

yang didapat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan 2022, UMKM memberi dampak besar terhadap naiknya PDB di Indonesia dengan jumlah hingga 60% atau setara Rp8.573,89 triliun dari cakupan unit usaha pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan juga bahwa, UMKM menyerap 97% atau setara 119,6 juta pekerja dari total tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa UMKM dapat mendorong peningkatan perekonomian dan juga mampu mengurangi permasalahan seperti pengangguran tenaga kerja.

Menurut data pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat perekonomian terbesar ketiga di Jawa Timur dibuktikan dengan distribusi nilai tambah Koperasi dan UMKM sebanyak 80.442 milyar pada tahun 2023. Selain itu, hal yang menjadi alasan mengapa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah perekonomian terbesar ketiga, karena memiliki kawasan industri yang luas dan memiliki jumlah kepadatan penduduk sebanyak 1.996.825 jiwa, sehingga banyak dari masyarakat yang memilih untuk berwirausaha.

UMKM di Kabupaten Sidoarjo memiliki peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah UMKM sebanyak 149.922 di tahun 2022, 151.043 UMKM di tahun 2023, dan 151.399 UMKM di tahun 2024. Salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki jumlah UMKM tertinggi adalah Kecamatan Sidoarjo dan terendah adalah Kecamatan Tarik. Pada tabel 1.2 menjelaskan gambaran kondisi UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 1. 2
Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2022-2024

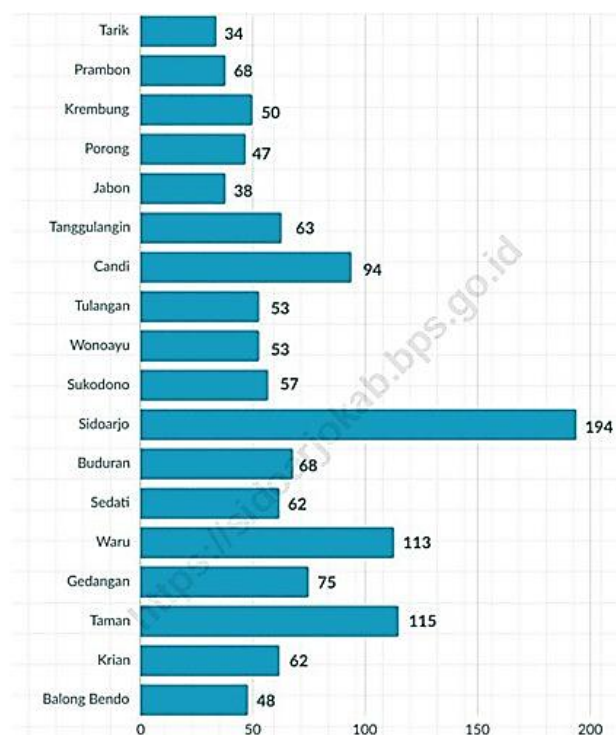
No.	Kecamatan	Jumlah UMKM Per Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tarik	3.771	3.795	3.800
2	Prambon	4.215	4.243	4.252
3	Krembung	10.293	10.329	10.333
4	Porong	6.369	6.403	6.425
5	Jabon	4.813	4.834	4.844
6	Tanggulangin	11.589	11.647	11.680
7	Candi	10.167	10.247	10.283
8	Tulangan	8.706	8.762	8.775
9	Wonoayu	4.852	4.889	4.907
10	Sukodono	5.377	5.416	5.447
11	Sidoarjo	21.390	21.503	21.552
12	Buduran	5.336	5.374	5.391
13	Sedati	6.557	6.608	6.621
14	Waru	10.015	10.069	10.082
15	Gedangan	7.886	7.929	7.943
16	Taman	8.367	8.673	8.698
17	Krian	12.958	13.016	13.040
18	Balongbendo	7.261	7.306	7.326
Jumlah UMKM		149.922	151.043	151.399

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo tahun 2024

UMKM sektor mikro adalah bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki skala usaha paling kecil dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah. Sektor mikro biasanya merujuk pada usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat secara individu dengan modal dan omzet yang relatif kecil. Terdapat beragam jenis usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo mulai dari toko retail, pedagang kaki lima, usaha kuliner skala kecil, kerajinan tangan rumahan, hingga layanan jasa sederhana. Dalam upaya mendukung pengembangan sektor mikro, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan program pendampingan dan dukungan bagi para pelaku usaha mikro. Hal tersebut antara lain, Kredit Usaha Mikro daerah Sidoarjo Gemilang, Pelayanan Klinik Konsultasi Usaha Mikro, Program Bedah 1.000 Warung, Pelatihan dan Pendampingan sertifikasi BPOM,

Platform Digital Tuko Yuk. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 merilis jumlah UMKM sektor mikro di Kabupaten Sidoarjo, adapun jumlah UMKM sektor mikro dijelaskan pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Jumlah Usaha Mikro Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo tahun 2024

Literasi keuangan adalah inti dasar yang harus dipahami oleh UMKM dengan naluri, keterampilan, profesional, dan sikap dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan finansial (Prakoso, 2020; Ruli et al., 2021). Pelaku UMKM dengan kemampuan literasi keuangan yang baik cenderung mampu membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Kemampuan ini mencakup pengelolaan dana secara bijak, seperti menabung, berinvestasi, dan memilih produk asuransi yang sesuai (Morgan & Long, 2020). Selain itu, literasi keuangan juga berperan dalam meningkatkan pemahaman, kemahiran, dan kebijakan

mengelola keuangan yang sesuai standar untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan (Anggriani et al., 2023). Dalam penelitian Marija et al. (2021) menjelaskan bahwa, setiap pelaku usaha yang unggul dalam literasi keuangan dan mampu memahami siklus keuangan usahanya, dapat mendorong kemampuan dalam mengevaluasi kondisi operasional terkait meningkatkan mutu kinerja usaha. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2015) masih banyak pelaku UMKM di Depok yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui manfaat dari literasi keuangan. Berdasarkan hal tersebut, kemampuan literasi keuangan yang baik menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM, karena dengan sumber daya tersebut dapat mendorong revolusi ekonomi yang baik dalam berwirausaha dan memberikan perkembangan positif terhadap kinerja usaha UMKM (Asisa et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Kabupaten Sidoarjo sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian yang dilakukan Rani & Desiyanti (2024), Fadilah et al. (2022), dan Musthafa et al. (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Landarica et al. (2023), Septiawan & Haryadi (2024) dan Tyra et al. (2021) menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM.

Inklusi keuangan adalah usaha dalam mendorong sistem keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat (Pellu, 2024; Kurniawan & Gitayuda 2021). Inklusi keuangan memberikan peran krusial bagi

UMKM dalam meningkatkan partisipasi mereka untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif (Sohilauw, 2018). Salah satu peran krusial inklusi keuangan adalah menyediakan sarana layanan dan produk finansial yang berkualitas kepada masyarakat tanpa adanya kendala (Aritonang et al., 2023). Dalam penelitian Assanniyah & Setyorini (2024) menjelaskan bahwa, UMKM yang memiliki akses finansial luas terhadap pendanaan, memungkinkan pelaku UMKM untuk semakin mengembangkan bisnis, memulai investasi, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan persaingan pemasaran dan menciptakan inovasi produk baru. Namun, hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan keuangan. Hal ini karena, banyak dari pelaku usaha kurang kepercayaan diri dalam menentukan tujuan penggunaan dana yang dimiliki dan mengelola biaya operasional (Assanniyah & Setyorini, 2024). Penelitian oleh Leatemia (2023) tentang pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, menjelaskan bahwa sulitnya akses ke lembaga keuangan menjadi salah satu penyebab kondisi keuangan yang tidak inklusif. Hal ini disebabkan karena lokasi yang terpencil, rendahnya sumber daya, minimnya motivasi, pengetahuan finansial, dan tujuan pengembangan usaha di kalangan pelaku UMKM (Leatemia, 2023). Kendala masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan juga disebabkan karena tingginya persyaratan dari bank yang terkadang dirasa sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat maupun pelaku UMKM, sehingga berdampak pada kualitas kinerja usaha UMKM (Maulana et al., 2022). Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini penting dilakukan analisis hubungan antara inklusi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian oleh Ottemoesoe et al. (2021), Sari et al. (2023), dan Zhang et al. (2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada inklusi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM.

Namun dalam penelitian oleh Murningsih et al. (2022), Azizah & Zulfia (2023), dan Anggriani et al. (2023) menjelaskan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM.

Modal usaha didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun aset yang digunakan sebagai landasan awal atau tambahan dalam membangun dan mengembangkan usaha (Yuzakhri et al., 2023; Ahmed & Mwangi, 2022). Modal usaha termasuk komponen penting dalam kegiatan usaha atau bisnis dan kegiatan operasional usaha pembelian persediaan maupun penjualan barang (Yuzakhri et al., 2023). Sumber modal usaha dapat berasal dari pemilik bisnis sendiri (*equity*) atau pihak lain seperti bank atau investor (*loan*) yang digunakan untuk mendanai operasional harian (Agus et al., 2023). Semakin banyak sumber atau modal awal yang digunakan untuk membiayai proses produksi, semakin besar juga pendapatan yang akan diterima nantinya (Ahmed & Mwangi, 2022). Apabila sebuah perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan modal atau sumber dayanya secara efisien, maka tingkat produktivitasnya akan meningkat (Hamzah et al., 2023). Masyarakat berpenghasilan rendah seringkali mengalami kesulitan mengakses layanan keuangan formal (Armando & Dewi, 2023). Hal ini karena, pihak bank dan lembaga keuangan lainnya berasumsi bahwa masyarakat tidak memiliki tujuan yang cukup kuat untuk berinvestasi, kurang memenuhi syarat dalam melakukan peminjaman modal awal (Ferdiansyah & Bukhari, 2021) Sehingga dari permasalahan tersebut, sulit bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dengan modal seadanya (Stein et al., 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan, adanya keterbatasan dan kecukupan modal menjadi nilai yang signifikan terhadap tingkat kinerja usaha UMKM. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh modal usaha

terhadap kinerja usaha UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian oleh Ferdiansyah & Bukhari (2021), Simoen & Peni (2023), dan Hesti et al. (2023) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel modal usaha terhadap kinerja usaha UMKM. Namun pada penelitian oleh Hamzah et al. (2023), Maulatuzulfa & Rokhmania (2022), dan Dewi & Herawati (2023) menunjukkan bahwa variabel modal usaha tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM.

Teori *Resource Based View* (RBV) pertama kali dikemukakan oleh Wernerfelt (1984) yang mendeskripsikan bahwa perusahaan sebagai sekumpulan aset dan kemampuan khusus yang jika dikelola dengan cara yang berbeda, dapat membuat perusahaan lebih unggul dari pesaingnya. Dalam penelitian Barney (1991) yang berjudul *Firm Resource and Sustained Competitive Advantage* menjelaskan bahwa sumber daya perusahaan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Teori RBV ini menyebutkan bahwa perusahaan akan memiliki kinerja yang baik apabila pengelolaan aset dilakukan secara efektif, baik dalam sumber daya berwujud maupun tidak berwujud (Khairani et al., 2024). Sumber daya tidak berwujud pada penelitian ini adalah literasi keuangan. Apabila seseorang memiliki pengetahuan pengelolaan finansial yang baik, maka dapat meningkatkan keunggulan dalam kinerja usaha UMKM salah satunya pengambilan keputusan yang efisien (Ruli et al., 2021). Sumberdaya tidak berwujud lainnya yang berkaitan dengan teori RBV adalah inklusi keuangan. Keuangan yang inklusif memberikan kemudahan akses pendanaan, baik dari pihak bank maupun pemerintah (Susilo et al., 2022). Dengan adanya akses yang mudah tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat secara optimal. Sumber keuangan sangat diperlukan oleh pelaku usaha sebagai

sarana untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan (Rofiq et al., 2023). Sumber daya berwujud pada penelitian ini terdapat pada modal usaha. Modal usaha merupakan salah satu faktor krusial yang dapat memengaruhi kinerja usaha UMKM, hal ini karena ketersediaan modal yang cukup sangat berguna untuk memperluas volume usaha, meningkatkan produksi, dan memperluas jangkauan pasar (Aulia & Hidayat, 2021). Keterkaitan teori RBV dengan modal usaha yakni, dapat memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami bagaimana sumber daya ini berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif dan peningkatan kinerja UMKM secara signifikan (Suriyanti et al., 2023).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sajuyigbe et al. (2020) dengan menggunakan variabel literasi keuangan dan inklusi keuangan. Hal yang menjadi pembeda pada penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel independen yaitu modal usaha yang memiliki korelasi dengan kinerja usaha UMKM. Penambahan variabel modal usaha pada penelitian ini adalah karena modal usaha sangat penting untuk mencerminkan peran sentral modal dalam keberhasilan suatu usaha. Peran sentral yang dimaksud adalah cukup atau kurangnya modal usaha akan memengaruhi keberhasilan usaha yang dikelola. Selain itu, hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian kali ini menggunakan objek dan tahun yakni UMKM Kabupaten Sidoarjo tahun 2022-2023, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan objek UMKM Southwest Nigeria pada tahun 2020. Penelitian sebelumnya tidak menggunakan *grand theory*, sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan teori RBV. Salah satu alasan lebih lanjut dalam mengadopsi variabel modal usaha sebagai elemen baru pada penelitian ini dan

menghubungkan variabel literasi keuangan dan inklusi keuangan adalah karena terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu mengenai ketiga variabel independen tersebut terhadap kinerja usaha UMKM. Sehingga, penting bagi peneliti untuk menelusuri lebih lanjut tentang bagaimana korelasi antara literasi keuangan, inklusi keuangan, dan modal usaha terhadap kinerja usaha UMKM.

Peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini karena penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai hubungan antara literasi keuangan, inklusi keuangan, dan modal usaha terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini relevan karena didukung oleh temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber pendanaan formal akibat rendahnya literasi keuangan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat inklusi keuangan, sehingga para pelaku UMKM kesulitan memperoleh sumber modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaku UMKM dan pembuat kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan meneliti terkait aspek kinerja usaha UMKM dengan menggunakan variabel independen literasi keuangan, inklusi keuangan, dan modal usaha. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja usaha UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha dengan baik. Dengan menggali lebih dalam mengenai bagaimana literasi keuangan, inklusi keuangan, dan modal usaha memengaruhi kinerja usaha UMKM diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dalam mendukung keberlangsungan dan tanggung jawab terhadap usaha

yang dikelola. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Modal Usaha Terhadap Kinerja Usaha UMKM Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Apakah variabel literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2023?
2. Apakah variabel inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2023?
3. Apakah variabel modal usaha berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka adanya tujuan penelitian sebagai berikut,

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2023.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2023.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh modal usaha terhadap kinerja usaha UMKM di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi mengenai literasi keuangan, inklusi keuangan, dan modal usaha berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha UMKM dengan dihubungkan dengan teori RBV. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung dan mengembangkan teori yang ada serta menambahkan literatur yang relevan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk membentuk kebijakan dan merancang strategi dalam meningkatkan kinerja usaha UMKM dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan modal usaha, serta mengevaluasi apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah sudah sesuai target yang ingin dicapai atau masih perlu menambah langkah untuk meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, modal usaha dan kinerja usaha UMKM.

b. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas, pengetahuan untuk mengubah cara pandang, dan membuat pelaku UMKM

semakin sadar seberapa penting pengetahuan keuangan dan kemampuan mengetahui literasi keuangan, inklusi keuangan, dan modal usaha lebih lanjut.

c. Bagi Akademisi

Bagi civitas akademik dan peneliti, penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk mengenal lebih dalam tentang peran literasi keuangan, inklusi keuangan, dan modal usaha terhadap kinerja usaha UMKM, selain itu diharapkan juga dari penelitian ini dapat memberi informasi dan literatur penunjang untuk penelitian selanjutnya oleh civitas akademik.